

DAKWAH MULTIKULTURAL DI INDONESIA

Studi Pemikiran dan Gerakan Dakwah

Abdurrahman Wahid

Rosidi

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung
abirosidi_@ymail.com

Abstract

History records that the process of Islamization in the archipelago lasted peacefully. It was under such peaceful process that made Islam became the religion of the majority of people who had previously embraced Hinduism, Buddhism, and traditional religion. Some factors that influenced the success of the Islamization process are identified mainly in the form of cultural approach rather than the use of violence and military force. The recent trend, however, shows that there is a shift in the methods of religious propaganda. Many muslim missionaries tend to be intolerant, rigid, self-righteous, even with their fellow muslims. Some even use violence such as damaging a place of worship, or prevent others to worship. This study tries to identify the approaches, methods, and multicultural tendency of Abdurrahman Wahid (Gus Dur), who preaches Islam with friendly and peaceful manners by respecting differences and the rights of every person.

Abstrak

Sejarah mencatat bahwa proses Islamisasi di Nusantara dilakukan *parada'iterdahuluberjalansecaradamai*, persuasif tanpa kekerasan, sehingga Islam secara berlahan menjadi agama mayoritas penduduk Nusantara yang awalnya sudah memeluk agama Hindu, Budha, dan aliran kepercayaan. Penghargaan, penggunaan seni, adat istiadat, dan tradisi kebudayaan lokal menjadi faktor penentu keberhasilan dakwah, bukan kekerasan dan kekuatan militer. Kini pasca reformasi wajah dakwah mengalami pergeseran, banyak kegiatan dakwah yang dilakukan saling memperolok satu dengan yang lain, merasa paling benar sendiri, kaku tidak toleran dan mudah menyalahkan orang lain yang berbeda paham. Bahkan ada yang menggunakan cara kekerasan seperti swiping, merusak tempat ibadah, dan menghalangi orang lain untuk ibadah. Tulisan

ini berupaya mengurai pendekatan, metode, pemikiran dan gerakan dakwah multikultural Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang mendakwahkan Islam dengan ramah, damai menghargai perbedaan dan memperjuangkan hak-hak kultural setiap warga negara sebagai perwujudan dari Islam *rahmatan lil 'alamin*.

Kata Kunci : dakwah multikultural, Islam Nusantara, Gus Dur.

A. Pendahuluan

Dalam konteks Indonesia yang majemuk dan *plural*, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 2 menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama dan keyaikan serta beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya itu. Namun, dalam prakteknya, kegiatan dakwah di Indonesia masih menghadapi kendala. Dakwah yang dilakukan oleh perorangan maupun secara kelembagaan, masih menampakkan egoisme pribadi dan kelompok. Dengan mengatasnamakan kebenaran dan agama, mereka melakukan penyerangan terhadap kelompok atau jamaah lain. Seperti yang terjadi akhir-akhir ini dimana Jamaah Ahmadiyah dimusuhi, disakiti, tempat tinggalnya dirusak, masjidnya dibakar. Di Sampang Madura Pondok Pesantren Syiah dibakar oleh sekelompok orang Islam yang berbeda aliran (*madzhab*). Di Bogor Jemaat Gereja Kristen Indonesia Yasmin dilarang membangun gereja dan dihalang-halangi beribadah.

Problem dakwah yang cukup penting lainnya adalah menyangkut perbedaan paham yang sering membuat hubungan sosial antarpemeluk agama terganggu, bahkan dalam taraf tertentu bisa menimbulkan kerawanan sosial. Problem perbedaan ini tidak hanya terjadi dalam internal Islam saja, melainkan juga dalam tataran kehidupan antarumat beragama. Berbagai kasus ketegangan seperti di atas adalah fakta yang tidak terbantahkan.

Menurut Amin Abdullah, problem perbedaan dalam agama terjadi karena interpretasi manusia akan teks suci atau *devinite text* yang dipercaya sebagai ungkapan langsung dari Tuhan kepada manusia, sementara prakteknya di masyarakat tidak ada tafsir tunggal yang dijadikan pedoman”.¹ Lebih lanjut Abdullah mengurai

¹ M. Amin Abdullah, “Kata Pengantar”, dalam Ainul Yaqin, *Pendidikan Multikultural Cross Cultural Understanding Untuk Demokrasi dan Keadilan* (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), h. xiv.

bahwa perbedaan bisa terjadi karena banyak faktor, antara lain budaya, ekonomi, politik, pendidikan atau perbedaan tingkat peradaban. Perbedaan tafsir agama itu kemudian menjadi problem pelik tatkala ada pihak yang menganggap bahwa otoritasnya saja yang paling berhak menginterpretasikan teks suci dan hanya tafsirnya yang paling benar dan valid, sedangkan tafsir orang lain dianggap salah. Yang muncul kemudian, dengan semena-mena mencap *bid'ah*, *kafir*, dan *murtad* disematkan kepada pihak lain. Padahal kebenaran hakiki hanya pada sang pemilik teks, yakni Tuhan itu sendiri. Tidak ada seorang penafsirpun yang berhak mengatasnamakan *the author* untuk hasil *ijtihad*-nya; masing-masing tafsir memiliki peluang untuk benar dan *kans* untuk salah pula.² Lebih ringkas, menurut Abū Ishāq asy-Syāṭibi sebagaimana yang dikutip oleh Alwi Syihab, kurangnya pengetahuan agama dan kesombongan adalah akar-akar *bid'ah* serta perpecahan umat, dan pada akhirnya menggiring ke arah perselisihan internal dan perpecahan.³

Menurut Umi Sumbullah, keyakinan kelompok Islam yang dikategorikan “radikal” terhadap teks agama, melahirkan teologis yang mereka klaim sebagai beragama yang paling benar.⁴ Hal ini akan berimplikasi pada pemahaman mereka bahwa agama hanya dipahami dari sudut pandang yang sempit dan *rigid*, dengan mempertentangkan dua nilai yang paradoksal, benar-salah, Islam-kafir, dan surga-neraka. Karena itu, dua kekuatan itu akan menghiasi konflik makro sepanjang sejarah kemanusiaan di muka bumi ini.⁵ Bagi kelompok radikal, diturunkannya agama adalah untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, mana yang halal mana yang haram, serta hal-hal yang dianggap sebagai pokok agama; maka orang yang berusaha mengotak-atik konsep agama sebagaimana yang tertulis dalam teks-teks dalam kitab suci merupakan bentuk “kegenitan” intelektual.⁶

² *Ibid.*

³ Alwi Syihab, *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama* (Bandung: Mizan, 1997), h. 256.

⁴ Umi Sumbullah, *Islam Radikal dan Pluralisme Agama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2010), h. 13.

⁵ *Ibid.*

⁶ Adian Husaini dan Nuim Hidayat, *Islam Liberal: Sejarah, Konsepsi, Penyimpangan dan Jawabanya* (Jakarta: Gema Insani Prees, 2002), h. 178.

Problem dakwah yang lebih aneh lagi, justru negara ikut melakukan pelanggaran terhadap hak-hak warga negara dalam hal kebebasan agama. Misalnya, Komunitas Adat Karuhun Urang di Cigugur Jawa Barat tidak boleh melakukan perkawinan bila tidak berdasarkan agama. Terpaksa mereka melakukan pernikahan berdasarkan keyakinan yang mereka tidak kehendaki. Karena untuk mendapat kartu penduduk mereka harus memilih salah satu agama yang diakui oleh negara.⁷ Undang-Undang dan peraturan yang semula dapat mengayomi keberadaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa, dipolitisir dan dipelintir sehingga tidak dapat digunakan lagi untuk melindungi para penghayat, termasuk hak-hak sipil dan budaya mereka.

Faktor lain yang menjadi hambatan dalam dakwah multikultural adalah adanya fanatisme yang berlebihan terhadap pendapat pribadi dan golongan, sehingga apriori menolak pendapat orang lain di luar kelompok atau jamaahnya. Berikutnya, adalah buruk sangka terhadap orang lain dan memandang orang lain dengan pandangan sinis.

Jika kondisi seperti ini dibiarkan, maka kedamaian, keadilan, dan ketenangan akan sulit bisa terwujud. Pada akhirnya Islam yang *rahmatan lil alamin* hanya ada dalam konsep dan tidak akan terlahir dalam kenyataan di Indonesia yang multikultur ini. Padahal, sejarah mencatat bahwa masuknya Islam di Nusantara dilakukan secara damai dan persuasif oleh para *da'i*, bukan karena kekuatan militer atau dukungan pemerintah. Hal ini berbeda dengan agama Kristen atau Katolik yang datang bersama dengan kolonial Belanda. Menurut 'Abas Mahmud sebagaimana yang dikutip oleh Alwi Syihab, Islam bisa diterima dan berkembang di kepulauan Nusantara yang penduduknya sudah menganut agama lain, oleh karena faktor keteladanan yang baik dari para *da'i* yang membawanya. Di setiap penjuru negeri terdapat bukti bahwa keteladanan yang baik menjadi faktor penentu penyebaran Islam, bukan dengan kekerasan.⁸ Faktor

⁷ Ahmad Baso, *NU Studies Pergolakan Pemikiran Antara Fundamentalisme Islam dan Fundamentalisme Neo-Liberal* (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 456-458.

⁸ Alwi Syihab, *Islam Sufistik: Islam Pertama dan Pengaruhnya hingga Kini di Indonesia* (Bandung: Mizan, 2001), h.14.

lain yang menjadi penentu keberhasilan dakwah Islam di Nusantara pada awalnya adalah penggunaan seni, adat istiadat, dan tradisi kebudayaan setempat. Dalam hal ini, A.H. Johns menegaskan, kecenderungan para *da'i* sufi yang menggunakan unsur-unsur setempat merupakan salah satu faktor keunggulan metode dakwah yang dikembangkan di Anak Benua India, termasuk Kepulauan Indonesia.⁹

Dari uraian di atas terlihat bahwa keteladanan, pendekatan persuasif dengan menghargai nilai budaya, dan adat istiadat menjadi faktor penentu keberhasilan dakwah; bukan cara memaksa, menakut nakuti dan intimidasi yang tidak sesuai dengan semangat Islam sebagai agama damai. Dalam konteks Indonesia yang masyarakatnya plural, model pendekatan dakwah para *da'i* pendahulu yang telah berhasil menyebarkan Islam di Nusantara perlu tetap dipelihara dan dikembangkan, sehingga nilai-nilai Islam bisa tetap hidup dan menjiwai kehidupan masyarakat.

Tulisan ini mengupas metode dan pendekatan dakwah yang menghargai nilai-nilai budaya masyarakat yang majemuk dan multikultur, penulis menganggap penting untuk mengkaji pemikiran dan aksi dakwah yang dilakukan oleh KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Metode yang digunakan dalam hal ini adalah pendekatan hermeneutik yang merupakan suatu aktivitas interpretasi terhadap suatu obyek yang mempunyai makna (*meaningful forms*) dengan tujuan untuk menghasilkan kemungkinan pemahaman yang obyektif.¹⁰

B. Abdurrahman Wahid sebagai Subyek Dakwah

Tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaan seorang pelaku atau subyek dakwah sangat menentukan keberhasilan kegiatan dakwah. Dengan bahasa lain, inti dari gerakan dakwah Islam terletak pada diri pendakwah.¹¹ KH. Abdurrahman Wahid atau yang akrab

⁹ A.H. Johns, "Muslim Mystics and Historical Writing", dalam D.G.E. Hall (ed.), *Historians of South East Asia* (Oxford: Oxford University Press; 1961), h. 37-49.

¹⁰ Abd. 'A'la, *Dari Neomodernisme ke Islam Liberal: Jejak Fazlur Rahman dalam Wacana Islam di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 2003), h.17.

¹¹ Muhammad Ali Aziz, *Ilmu Dakwah* cet. ke-2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 216.

dipanggil Gus Dur (1940-2009) adalah sosok *da'i* yang memiliki integritas, keilmuan, kemampuan, pengalaman, dan memenuhi kriteria sebagai sosok *da'i* ideal *ala* Rasulullah yang dideskripsikan oleh as-Siba'i, antara lain: berasal dari keluarga yang terhormat dan mulia, memiliki kepedulian tinggi terhadap persoalan yang dirasakan oleh masyarakat, memiliki kecerdasan yang tinggi, memiliki usaha yang baik sebagai sumber kehidupan untuk menghidupi keluarga dan kebutuhannya, dan memiliki pengalaman ke luar negeri dan pergaulan luas dengan masyarakat.¹²

Dari sisi keturunan, Gus Dur adalah putra KH. Wahid Hasyim yang menjabat Menteri Agama pada era Soekarno. Kakek Gus Dur, KH. Hasyim Asya'ry, adalah pendiri Nahdlatul Ulama, organisasi keagamaan terbesar di Indonesia.¹³ Keduanya sangat dihormati dikalangan masyarakat pedesaan tradisional karena sebagai ulama, guru yang banyak memberi inspirasi kepada masyarakat.

Dari sisi pendidikan, Gus Dur memiliki basis pendidikan pesantren yang kuat. Setidaknya ia telah mengenyam pendidikan pesantren di tiga pesantren besar, yaitu Pesantren Krapyak Yogyakarta asuhan Kiai Ali Ma'sum, Pesantren Tegalrejo Magelang, Pesantren Tambak Beras Jombang di bawah asuhan Kiai Wahab Chasbullah. Sementara pendidikan formalnya ditempuh mulai dari SMEP di Yogyakarta, kemudian meneruskan kuliah ke Universitas Al-Azhar Mesir, lalu Bagdad.

Dari sisi kemampuan intelektual, Abdurrahman Wahid, dikenal sebagai sosok cendekiawan yang berwawasan luas, kritis dan berani melakukan kritik kepada penguasa atau siapa saja yang menurutnya melakukan penyimpangan dan pelanggaran dalam praktek penyelenggaraan negara berdasarkan aturan hukum dan demokrasi. Gus Dur juga dikenal sebagai penulis produktif yang banyak memiliki karya ilmiah dalam bentuk jurnal, majalah, buku dan buletin.

Dari sisi kepemimpinan, Gus Dur pernah menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama selama tiga periode ,

¹² Musthafa as-Siba'i, *Sari Sejarah Perjuangan Rasulullah Saw.* (Jakarta: Media Dakwah, 1997), h. 30-44.

¹³ Greg Barton, *Biografi Gus Dur*, terj. Lie Hua, cet. ke-9 (Yogyakarta: LKiS, 2010), h. 26.

Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa, hingga Presiden RI keempat.¹⁴ Sebagai pemimpin, Gus Dur dikenal sebagai sosok pemberani dalam mengambil keputusan, bahkan terkadang bisa membahayakan dirinya dan keluarganya. Ia merupakan satu di antara pemimpin Ormas Islam yang berani berseberangan dengan rezim Orde Baru dan berani memberi kritik yang tajam kepada Presiden Soeharto sebagai penguasa tunggal kala itu. Bahkan, karena kritiknya tersebut ia acapkali menerima ancaman, baik secara fisik dan psikis.¹⁵

Dari sisi pengalaman dan Gus Dur sering melakukan kunjungan ke luar negeri, baik untuk studi, menjadi narasumber seminar, kepentingan organisasi, hingga urusan kenegaraan. Saat menjadi Presiden, Gus Dur tercatat sebagai presiden yang paling banyak berkunjung ke luar negeri dalam waktu yang singkat. Di dalam negeri, Gus Dur dikenal sebagai kiai yang banyak melakukan kunjungan silaturahmi kepada kiai-kiai atau orang yang dihormati dan layak dimintai nasehat. Kebiasaan itu dimulai sejak muda sampai tua, bahkan ketika ia menjadi presiden.¹⁶ Selain itu sebagai tokoh yang berpengaruh, ia juga sering dikunjungi untuk berbagai keperluan, mulai dari hal-hal kecil seperti minta do'a dan nama untuk anak yang baru lahir sampai persoalan yang berat, seperti agama, politik, ekonomi, budaya, dan lainnya.

Dari paparan di atas terlihat bahwa Gus Dur merupakan sosok ulama plus yang banyak memiliki kelebihan dari berbagai sisi, seperti keturunan, wawasan keilmuan, relasi, kepemimpinan, kharisma dan lain-lain. Namun sebagai manusia biasa ia juga memiliki sisi-sisi kelemahan, antara lain ucapannya yang ceplas-ceplos dan sikapnya yang terkadang dianggap tidak konsisten dan plin-plan. Azyumardy Azra misalnya pernah menyebut Gus Dur sebagai '*a part of the problem*'.¹⁷

Lepas dari berbagai kritik terhadap sepak terjang dan

¹⁴ A. Nur Alam Bachir, *99 Keistimewaan Gus Dur* (Jakarta: Kultura, 2007), h. ix

¹⁵ *Ibid.*, h. 4.

¹⁶ *Ibid.*, h. 3.

¹⁷ Idris Thaha (ed.), *Islam Substantif: Agar Umat Tidak Menjadi Buih* (Bandung: Penerbit Mizan, 1999), h. 367.

langkah-langkah politik Gus Dur yang dinilai kurang proporsional, Gus Dur merupakan tokoh besar sekaligus subyek dakwah yang pemikiran dan gerakan dakwahnya layak untuk digali dan dikembangkan guna memperkaya khazanah ilmu dakwah, materi, metode, dan pendekatan dakwah di tengah masyarakat yang pluralistik seperti Indonesia ini, terutama pada era pascareformasi, di mana kran kebebasan berbicara dan berpendapat semakin terbuka. Namun, yang menjadi persoalan, justru pola-pola dakwah dengan menggunakan kekerasan yang lebih menonjol dan mendominasi pemberitaan di media massa, sementara dakwah yang damai, sejuk, dan toleran kurang terpublikasikan.

C. Pendekatan Dakwah Multikultural Abdurrahman Wahid

Pendekatan dakwah merupakan titik tolak atau sudut pandang kita terhadap dakwah.¹⁸ Pada umumnya, penentuan pendekatan dakwah didasarkan pada mitra dakwah dan suasana yang melingupinya. Dalam bahasa lain, pendekatan dakwah harus tertumpu pada pandangan *human oriented*, dengan menempatkan pandangan yang mulia atas diri manusia sebagai mitra dakwah.¹⁹

Sjahudi Siradj sebagaimana dikutip Ali Aziz mengemukakan tiga pendekatan dakwah, yaitu pendekatan budaya dan bahasa, pendekatan pendidikan, dan pendekatan psikologis.²⁰ Pendekatan budaya dan bahasa dalam dakwah adalah penggunaan budaya dan bahasa sebagai alat atau media untuk menyampaikan pesan dakwah, misalnya penggunaan wayang kulit dan bahasa Jawa untuk dakwah pada komunitas Suku Jawa, penggunaan bahasa Betawi dan lenong untuk komunitas Suku Betawi, dan seterusnya. Pendekatan pendidikan adalah penggunaan pendidikan (*ta'lim*) sebagai sarana untuk mencerdaskan, mencerahkan masyarakat dari kebodohan dalam bidang ilmu agama dan pengetahuan lainnya. Sarananya bisa melalui mimbar jum'at, majelis *ta'lim*, penataran, pelatihan, pendidikan formal dan non formal. Sedangkan pendekatan psikologis adalah pendekatan dakwah dengan sentuhan psikologis

¹⁸ Muhammad Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*, h. 347.

¹⁹ Toto Tasmara, *Komunikasi Dakwah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), h. 43-44.

²⁰ Aziz, *Ilmu Dakwah*, h. 347.

kepada *mad'u* melalui bimbingan konseling, kunsultasi dalam urusan keluarga, agama, dan lainnya.

Pendekatan terhadap mitra dakwah lainnya yang bisa digunakan adalah pendekatan sosial kemasyarakatan. Pendekatan ini meliputi pendekatan sosial politik, pendekatan sosial budaya, dan pendekatan sosial ekonomi. Pendekatan dakwah di atas bisa disederhanakan menjadi dua pendekatan, yakni pendekatan struktural dan pendekatan kultural.²¹ Pendekatan struktural adalah pendekatan dengan menggunakan kekuasaan atau politik. Artinya, untuk memperjuangkan tegaknya keadilan, kemakmuran, pemerataan, dan sistem kehidupan yang lebih baik, dibutuhkan orang-orang yang duduk di lembaga *legeslatif* untuk membuat undang-undang. Selanjutnya untuk melaksanakan undang-undang diperlukan orang-orang yang duduk di lembaga pemerintahan (eksekutif) seperti menjadi presiden, menteri, gubernur, walikota, bupati, camat dan seterusnya. Jika jajaran pelaksana pemerintahan ini dipegang orang yang jujur, amanah, dan adil, maka kesejahteraan akan dirasakan oleh masyarakat. Sebaliknya, jika kekuasaan dipegang orang yang tidak amanah dan tidak jujur, maka yang terjadi adalah kerusakan dan kehancuran. Sedangkan pendekatan kultural adalah pendekatan non politis; dalam hal ini bisa melalui jalur pendidikan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, mengembangkan kebudayaan yang bernilai tinggi, memberdayakan ekonomi, melatih ketrampilan dan keahlian (*life skill*), dan menegakkan HAM dan demokrasi.

Dari pemaparan di atas, Abdurrahman Wahid menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan struktural dan kultural dalam berdakwah. Pendekatan struktural dia gunakan sewaktu menjadi presiden selama 19 bulan. Selama menjadi presiden banyak kebijakan dibuat untuk melindungi dan menghargai eksistensi kelompok minoritas seperti Komunitas Tionghua dan mengakui Konghucu menjadi agama resmi yang diakui oleh negara. Sedangkan pendekatan kultural dia gunakan ketika menjadi guru, aktivis organisasi, dan memimpin PBNU. Dalam dunia pendidikan pada tahun 1960-an, ia pernah menjadi tenaga pengajar di pesantren

²¹ *Ibid.*, h.348.

Tambak Beras milik kakeknya yang salah satu muridnya adalah Nuriyah yang kelak menjadi istrinya. Tahun 1970 Gus Dur didaulat menjadi Dekan Fakultas Ushuluddin, Universitas Hasyim Asy'ari Jombang hingga 1974. Masih dalam bidang pendidikan Gus Dur pernah menjadi konsultan di Lembaga Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES),²² Di bidang budaya tahun 1983, Gus Dur pernah menjadi Ketua Dewan Kesenian Jakarta. Pada Tahun 1986 dia terpilih menjadi ketua Festival Film Indonesia, dan anggota Dewan Pers Nasional. Dalam bidang ekonomi, ketika ia menjadi ketua umum PBNU ia membuat kerja sama dengan Bank Summa untuk mendirikan Bank Perkreditan rakyat (BPR NU-SUMMA) di daerah-daerah. Di bidang politik Gus Dur pernah duduk sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan puncak kariernya ketika pada 20 Oktober 1999 terpilih menjadi Presiden RI ke-4.

Secara spesifik, Gus Dur mampu menggunakan pendekatan struktural dan pendekatan kultural dalam aktivitas dakwahnya. Hal ini yang membedakan dengan para *da'i* pada umumnya, yang hanya bisa menggunakan pendekatan salah satu seperti kultural saja. Misalnya AA Gym, Jeffri Al-Bukhari, Yusuf Mansur, Ustad Solmet, dll. Dengan demikian, maka Gus Dur adalah seorang *da'i* yang multi talenta, memiliki dua pendekatan (struktural dan kultural) Namun demikian dari sekian banyak kegiatan dakwahnya, pendekatan kultural lebih banyak dilakukan dibanding dengan dakwah strukturalnya. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa sejak muda sampai usia 60-an tahun Gus Dur lebih banyak melakukan dakwah melalui NU, dan mendorong lahirnya berbagai organisasi – organisasi Non Pemerintah (ORNOP). Adapun Ornop-Ornop yang lahir pada dekade 80-an sampai 90-an diantaranya Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS), Lembaga Pengembangan Sumber Daya manusia (Lapesdam)²³. Menurut Barton, pada tahmun

²² Mujamil Qomar, *NU "Liberal" Dari Tradisionalisme Ahlussunah Ke Universalisme Islam* (Bandung: Mizan, 2002), h.160.

²³ Ornop pertama yang lahir adalah P3M. P3M lahir di Jakarta tahun 1983 dengan tujuan untuk memberikan NU suatu badan koordinasi untuk mengelola proyek-proyek pembangunan masyarakat yang makin meningkat jumlahnya yang didanai oleh lembaga donor dari luar negeri. Lkis, adalah

1990-an, kalangan muda NU mendirikan Ornop lebih banyak lagi dikota-kota di Jawa, seperti eLSAD di Surabaya. Dalam beberapa hal Gus Dur banyak terlibat secara langsung dalam sejumlah Ornop ini.²⁴ Di samping aktif di lingkungan NU, Gus Dur juga membentuk Forum Demokrasi (FORDEM) bersama-sama kawan-kawannya yang bersifat lintas agama dan budaya dengan tujuan untuk mendorong tumbuhnya budaya demokratis, masyarakat yang taat hukum dan dihormatinya hak-hak kultural masyarakat.

Hal lain yang membedakan Gus Dur dengan para *da'i* lainnya, adalah bahwa Gus Dur atau Abdurrahman Wahid sosok pembela bagi mereka orang-orang terancam maupun tertindas dalam seluruh aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, budaya dan agama. Bentuk pembelaan itu bisa melalui esai-esai tulisan, ucapan sampai kepada aksi nyata dalam bentuk tindakan. Wahid juga tidak pandang bulu, tidak membedakan agama, etnis, warna kulit, posisi sosial. Wahid juga tidak ragu untuk mengorbankan *image* sendiri sebagai kyai berdarah biru, politisi senior, intelektual terkemuka, untuk membela korban yang perlu dibela. Diapun tidak surut karena dikritik, dihujat, dengan berbagai tuduhan negatif seperti ketua ketoprak, neo-PKI, dibaptis masuk Kristen, agen Zionis Yahudi dan sebagainya. Tidak ada beban bagi dirinya ketika harus membela ketidakadilan.²⁵ Hal-hal seperti itulah yang membedakan Gus Dur dengan para *da'i*, mubalig maupun ustad-ustad yang lain di Indonesia.

D. Metode Dakwah Abdurrahman Wahid

Dalam pelaksanaan dakwah, metode merupakan unsur penting yang ikut menentukan sukses tidaknya kerja dakwah. Pemakaian metode yang salah bisa menimbulkan kesahpahaman dan menjauhkan *audien* dari tujuan dakwah. Penggunaan metode yang sesuai dengan tingkat pemikiran dan kondisi masyarakat atau jamaah akan membantu memudahkan dalam proses dakwah.

Secara garis besar, metode dakwah ada tiga macam, yakni:

lembaga kajian Islam dan sosial didirikan di Yogyakarta pada tahun 1990.

²⁴ Greg Barton, *Biografi Gus Dur*, h. 192-193.

²⁵ Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita Agama Masyarakat Negara Demokrasi* (Jakarta: The Wahid Institute, 2010), h. v

Dakwah secara lisan (*da'wah bi al-lisan*), dakwah tertulis (*da'wah bi al-qalam*), dan dakwah dengan perbuatan atau tindakan (*da'wah bi al-hal*). Berdasarkan tiga metode dakwah tersebut, maka metode dakwah bisa dijabarkan ke dalam metode-metode (1) ceramah, (2) diskusi, (3) konseling, (4) karya tulis, (5) pemberdayaan masyarakat, dan (6) metode kelembagaan.²⁶

Dalam aktivitas dakwah yang dilakukan oleh Abdurrahman Wahid (Gus Dur), metode dakwah yang digunakan meliputi metode-metode sebagaimana yang diuraikan di atas. Hal ini menunjukkan bahwa Gus Dur merupakan seorang *da'i* atau pendakwah telah menggunakan berbagai metode (*multiple methode*) untuk mendakwahkan Islam yang menjadi rahmat bagi alam semesta. Ungkapan ini didasarkan pada kenyataan bahwa Gus Dur selain aktif berceramah di berbagai even dan kesempatan, terutama ketika menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama' yang setiap saat berkeliling ke daerah untuk memberikan tausiyah/nasehat, wejangan kepada pengurus atau jamaah Nahdliyin.

Dia juga dikenal aktif menjadi penulis yang produktif yang karya-karya tulisnya sering menghiasi media tulis pada era 1980-an. Adapun karya-karya intelektual Gus Dur yang telah dibuat buku diantaranya : Bunga Rampai Pesantren (1970), Muslim Di Tengah Pergumulan (1981), Kiai Nyentrik Membela Pemerintah (1997), Islam tanpa Kekerasan (1998), Islamku Islam Anda Islam Kita (2006). Karya lain berupa terjemah, Cinta dan fakta karya Husain Naser. Dia juga banyak menulis kata pengantar pada buku seperti : Nahdlatul Ulama' Traditional and Modernity in Indonesia, karya Greg Barton dan Greag Fealy. Kitab Kuning Pesantren dan tarekat karya martin Van Bruinessen, Telaah Kritis Atas Pemikiran Hasan Hanafi, karya Kazuo Shimogaki, dan buku Nahdlatul Ulama dan Pancasila karya Einar M. Sitompul.²⁷

Di samping itu, Gus Dur sering menjadi narasumber pada berbagai seminar dan diskusi, baik di dalam maupun di luar negeri.

²⁶ Muhammad Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*, h.358-382. Lihat juga Dzikron Abdullah, *Metodologi Dakwah*, h. 14-25; Asmuni Syukir, *Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islam* (Surabaya: Penerbit Al-Ikhlash, t.t.), h. 105-124; Zakiyah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 179.

²⁷ Mujamil Qomar, *NU "Liberal"*, h. 167-168.

Pendapat-pendapatnyapun banyak dikutip dan diabadikan para penulis, baik dari kalangan muda NU, maupun pihak lain yang tertarik dengan pemikiran-pemikiran yang otentik dan kreatif atas berbagai isu atau persoalan.

Dalam hal pemberdayaan masyarakat, apa yang dilakukan Gus Dur bersama anak-anak muda NU dengan mendirikan lembaga Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), Lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia (LAPESDAM), Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS), dan eLSAD merupakan kerja nyata Gus Dur. Dia mendorong dan memantau secara aktif lahirnya lembaga-lembaga tersebut, sebagai wadah pemberdayaan anak-anak muda NU. Di luar itu bersama-sama masyarakat lintas agama, Gus Dur juga terlibat dalam pendirian lembaga-lembaga atau organisasi perjuangan untuk tegaknya demokrasi seperti Forum Demokrasi (FORDEM) dan lain-lain. Dalam bidang politik, Gus Dur juga merupakan pendiri Partai Kebangkitan Bangsa yang merupakan wadah aspirasi politik warga Nahdlyin dan masyarakat umum.

Dari sisi dakwah kelembagaan, Gus Dur telah mengabdikan dirinya di Lembaga Pesantren Tambak Beras selama tiga tahun (1960-1963), menjadi Dekan di Universitas Hasyim Asy'ary (1970). Dan menjadi ketua umum PBNU selama tiga periode (1984-1989), periode (1989-1995), dan periode (1995-2000).²⁸

Metode dakwah lain yang digunakan Gus Dur adalah metode seni budaya. Kecintaan dan kegemaran Gus Dur sejak muda adalah menonton wayang kulit, film dan membaca buku-buku cerita novel dan sastra mengilhami untuk dakwah dengan membentuk grup musik yang dinamai Kiai Ganjur, bersama seniman-seniman muda NU seperti al-Jastro Ngatawi. Dalam grup Ki Ageng Ganjur, Gus Dur didaulat sebagai pengisi orasi dan nasehat-nasehat agama dan nasehat kehidupan di sela-sela bunyi gamelan. Metode dakwah seperti ini pernah dipraktekkan oleh para wali sembilan (Wali Songo) dalam mengajarkan Islam di tengah masyarakat Jawa. Rupaya Gus Dur ingin melanjutkan tradisi metode dakwah para wali tersebut dalam berdakwah.

²⁸ *Ibid.*, h. 167.

E. Pemikiran dan Gerakan Dakwah Multikultural Abdurrahman Wahid

Melalui berbagai tulisan, pernyataan dan sikap yang bisa ditemukan pada berbagai sumber, bisa dijelaskan pemikiran-pemikiran Gus Dur tentang bagaimana dakwah dilakukan. Sebagai agama yang membawa rahmat bagi alam semesta, Islam menurut Gus Dur harus diajarkan kepada masyarakat melalui cara-cara yang damai, santun humanis. Untuk itu semua aktivitas dakwah harus dilakukan melalui program aksi untuk menjamin keselamatan fisik warga negara secara individual (*ḥifẓ an-nafs*), hak warga untuk melindungi keluarga dan keturunan mereka (*ḥifẓ an-nasl*), keselamatan milik mereka, dan kewajaran dalam profesi mereka (*ḥifẓ al-māl*).²⁹ Implementasi jaminan ini harus dapat mendukung lahirnya kesejahteraan material dan spiritual masyarakat.

Lebih lanjut Gus Dur berpendapat, bahwa untuk mencapai kesejahteraan material dan spiritual, peran dan partisipasi masyarakat (*da'i*) secara langsung harus dilibatkan. Dalam hal ini ajaran Islam berfungsi sebagai etika sosial bagi masyarakat. Untuk mengejar tujuan itu, dukungan strategi dari masyarakat ke negara menjadi perlu, termasuk pertumbuhan perkumpulan yang bebas untuk memperjuangkan peningkatan standar kehidupan sosio ekonomis sekaligus melindungi hak-hak sosio politik dari rongrongan kelompok masyarakat yang merugikan, dan untuk mendukung upaya saling menghormati hubungan antar iman (*interfaith relation*).³⁰

Dari penjelasan tersebut, bisa dipahami bahwa menurut Gus Dur, dakwah Islam musti dilakukan dalam kerangka menjaga atau menegakkan nilai-nilai universalisme Islam sebagai agama samawi yang terakhir kepada warga masyarakat, baik secara individu maupun kelompok. Universalisme Islam itu terimplementasikan dalam lima buah jaminan dasar kehidupan yang dalam literatur hukum Islam disebut "*maqāṣid at-tasyrī' al-khamsah*" (lima macam tujuan syara'), yaitu jaminan dasar akan (1) keselamatan fisik

²⁹ Abdurrahman Wahid, "Islam, Anti-Kekerasan, dan Transformasi Nasional", dalam Glenn D. Paige, Chaiwat Satha Anand, dan Sarah Gilliatt (eds.) *Islam Tanpa Kekerasan*, terj. M. Taufiq (Yogyakarta: LKiS, 1998), h. 74.

³⁰ *Ibid.*

warga masyarakat dari tindakan destruktif di luar hukum (*ḥifz an-nafs*); (2) keselamatan keyakinan agama masing-masing, tanpa ada paksaan untuk berpindah agama (*ḥifz ad-dīn*); (3) keselamatan keluarga dan keturunan (*ḥifz an-nasl*); (4) keselamatan harta benda dan milik pribadi dari gangguan atau penggusuran diluar prosedur hukum (*ḥifz al-māl*); dan (5) keselamatan hak milik dan profesi (*ḥifz al-aql*).³¹

Jaminan akan keselamatan fisik warga masyarakat mengharuskan pemerintahan dalam menjalankan kekuasaan berdasarkan hukum, dengan perlakuan adil terhadap semua warga masyarakat tanpa membedakan asal usul suku bangsa, agama, dan keturunan, sesuai dengan hak-hak kultural masing-masing. Hanya dengan kepastian hukum, suatu masyarakat bisa mengembangkan wawasan persamaan hak dan kesamaan derajat antara sesama warga negara. Menurut Gus Dur, dengan kesamaan hak warga masyarakat dan perlakuan yang sama di depan hukum akan menjamin terwujudnya keadilan sosial dalam arti yang sebenar-benarnya.³²

Demikian halnya dengan jaminan akan keselamatan keyakinan agama. Bagi Gus Dur, seharusnya warga masyarakat melandasi hubungan antar warga masyarakat atas dasar sikap saling menghargai, menghormati keyakinan masing-masing, dan menghindari terjadinya sikap kedengkian, permusuhan dan kedzaliman terhadap kelompok minoritas sebagai akibat sempitnya pandangan dan semangat keagamaan yang berlebihan³³. Dengan tauhid, Islam menegakkan penghargaan kepada perbedaan pendapat dan benturan keyakinan. Jika perbedaan keyakinan bisa ditolerir, tentu sikap tenggang rasa lebih diperkenankan dalam mengelola pandangan politik dan ideologi. Dari aspek ini, jelas Islam memiliki pandangan universal, yang berlaku bagi seluruh umat manusia.

Jaminan dasar akan keselamatan harta-benda merupakan sarana bagi perkembangan hak-hak individu secara wajar dan proporsional, dalam kaitannya hak-hak masyarakat atas individu.

³¹ Abdurrahman Wahid, *Islam Kosmopolitan Nilai-Nilai Indonesia Transformasi Nasional dan Kebudayaan* (Jakarta: The Wahid Institute, 2007), h. 4-5.

³² *Ibid.*, h. 5.

³³ *Ibid.*, h.7.

Melalui hak ini warga masyarakat memiliki peluang untuk mengembangkan diri, melalui pola dan cara yang dipilihnya sendiri, namun tetap dalam alur umum kehidupan masyarakat. Sejarah mencatat bahwa hak dasar akan kepemilikan harta benda inilah yang menjadi penentu kreativitas warga masyarakat.

Secara keseluruhan, kelima jaminan dasar kehidupan di atas menurut Gus Dur menampilkan universalitas pandangan hidup yang utuh dan bulat. Untuk mencapainya, pemerintah harus tegas dan konsisten untuk menjalankan pemerintahan ini berdasarkan prinsip hukum yang berkeadilan, persamaan derajat, dan sikap tenggangrasa terhadap perbedaan pandangan yang ada. Dari sisi dakwahnya, yang tidak kalah penting adalah bagaimana ada keikutsertaan lembaga-lembaga dakwah atau lembaga non pemerintah (LSM) yang bekerja secara bebas tanpa terikat oleh pemerintah dan pihak manapun untuk mendorong pemerintah sekaligus menjadi pengkritik atas berbagai penyimpangan yang terjadi di masyarakat guna tercapainya lima dasar jaminan kehidupan tersebut.

Sebagai manifestasi atas paham universalisme Islam yang utuh tersebut, gerakan dakwah Gus Dur tercermin dalam beberapa sikap dan tindakannya, antara lain kegigihannya dalam membela kaum minoritas seperti membela Ahmadiyah, Syiah, Kristen, Inul Daratista, dan lain-lain. Ketika ada kelompok minoritas diperlakukan tidak adil, maka Gus Dur tampil melakukan pembelaan. Pembelaan Gus Dur pada kelompok minoritas tersebut bukan membela keyakinan atau idologi mereka, tetapi Gus Dur ingin kebebasan warga negara untuk beragama dan berkeyakinan sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2 benar-benar dihormati. Karena menghormati perbedaan bagi Gus Dur sama dengan menjaga universalisme Islam itu sendiri.

Sikap keberagaman yang toleran dan universal juga dibuktikan dengan pengakuan Gus Dur terhadap keberadaan agama Konghucu sebagai agama dan keyakinan yang sah hidup di Indonesia. Menurut Hermawan Sulisty, kebijakan Gus Dur ketika ia menjadi Presiden yang mengesankan adalah memperkuat *civil society* masyarakat Madani dengan membuka ruang publik yang seluas-luasnya bagi ekspresi kebebasan pers. Gus Dur secara ofensif

membuka ruang pluralisme secara terbuka, dan menetapkan Kong Hu- Cu sebagai agama resmi.³⁴ Kemudian untuk menghormati komunitas suku Tionghua, Gus Dur menetapkan Hari Besar Imlek sebagai hari libur nasional, dan memberikan kebebasan untuk menggelar kebudayaan dan kesenian mereka, tentu saja kebijakan ini disambut hangat oleh warga etnis keturunan Tionghoa yang sejak lama sudah sangat dinantikan.³⁵ Menurut Ikrar Nusa Bhakti, peneliti senior LIPI, Gus Dur juga melindungi kaum minoritas yang menganut agama atau kepercayaan di luar kelompok utama agama-agama besar. Tak mengherankan jika Gus Dur melindungi kaum Ahmadiyah yang sering dikejar-kejar dan tidak diberi ruang hidup dan berkembang oleh sekelompok masyarakat tertentu yang menginginkan ‘pemurnian agama’.³⁶

Apa yang menjadi pemikiran dan upaya Gus Dur dalam mendakwahkan Islam di Indonesia yang ramah, damai anti kekerasan tidak selamanya berjalan mulus. Banyak pihak dari kalangan Islam sendiri yang tidak sejalan dengan pemikiran dan langkah-langkahnya. Hal-hal terjadi disebabkan karena beberapa hal. *Pertama*, banyak masyarakat yang belum mampu memahami pemikiran Gus Dur yang terlalu maju untuk masyarakatnya. Laude Ida sebagaimana yang dikutip Mujamil Qomar menilai pemikiran Abdurrahman Wahid acap kali melewati batas-batas normatif NU. Pemikiran dan tindakannya cenderung menentang kemapanan.³⁷ Hasyim Mujadi, mantan pengurus Besar Nahdlatul Ulama’ pernah mengusulkan agar dilakukan pemahaman ulang atas ide-ide dan pemikiran cerdas Gus Dur yang dianggap bermanfaat bagi pembangunan masyarakat sipil, tetapi belum dipahami secara benar oleh kebanyakan orang.

Kedua, lembaga-lembaga dakwah yang ada belum maksimal melakukan pembelaan terhadap kelompok-kelompok minoritas, baik dari kalangan internal Islam sendiri, seperti Jamaah Syiah di Sampang Madura, Ahmadiyah di Bogor yang teraniaya

³⁴ Effendy Choiric, Arief Mudatsir, dan Hermawan Sulistyio (ed.), *Sejuta Gelar untuk Gus Dur* (Jakarta: Pencil 324; PB IKA-PMII, 2010), h. xii.

³⁵ *Ibid.*.

³⁶ *Ibid.*, h. 160.

³⁷ Mujamil Qomar, *NU “Liberal”*, h. 176.

maupun kelompok minoritas yang berbeda agama seperti Jamaat Gereja Yasmin di Bogor Jawa Barat. *Ketiga*, pemerintah belum bisa memberikan jaminan perlindungan keselamatan kepada masyarakat untuk bebas menjalankan agama dan keyakinannya secara bebas dan bertanggung jawab. Sebagai bukti banyak peristiwa kekerasan yang menimpa kelompok minoritas dan menelan korban harta benda bahkan nyawa, tetapi pihak keamanan selalu terlambat mencegah berbagai peristiwa anarkis tersebut.

F. Kesimpulan

Islam adalah agama rahmat bagi alam semesta yang dalam proses penyebarannya di Indonesia dilakukan secara damai, persuasif dan menghargai nilai-nilai budaya, adat dan tradisi masyarakat. Namun, dalam perkembangannya, gerakan dakwah ada yang dilakukan oleh sekelompok muslim dengan cara-cara yang keluar dari kaidah-kaidah toleransi, keadilan, dan musyawarah, sehingga mengakibatkan disharmoni dalam kehidupan di masyarakat. Pada konteks ini, KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mencoba mendakwahkan agama dengan pendekatan multikultural yang menghargai, menghormati budaya dan perbedaan pemahaman sebagai *sunnatullah* yang mesti dijaga keberadaannya. Gus Dur secara tegas dan nyata memberikan perlindungan hak-hak minoritas atas diskriminasi yang dilakukan oleh negara dan kelompok mayoritas. Hal ini dilakukan oleh Gus Dur karena Indonesia adalah rumah bersama semua warga bangsa yang berbeda-beda agama, suku, adat istiadat, yang semua perlu dihormati, agar tercapai kehidupan damai, rukun. Karena itu tidak boleh mendakwahkan agama dengan cara-cara kekerasan, dan melanggar hak-hak asasi manusia yang sudah dilindungi oleh Undang-Undang.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘A’la, Abd. *Dari Neomodernisme ke Islam Liberal: Jejak Fazlur Rahman dalam Wacana Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 2003.
- Abdullah, M. Amin. “Kata Pengantar”. Ainul Yaqin. *Pendidikan Multikultural: Cross Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*. Yogyakarta: Pilar Media, 2005.
- Aziz, Muhammad Ali. *Ilmu Dakwah*. cet. ke-2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Bachir, A. Nur Alam. *99 Keistimewaan Gus Dur*. Jakarta: Kultura, 2007.
- Barton, Greg. *Biografi Gus Dur*. terj. Lie Hua. cet. ke-9. Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Baso, Ahmad. *NU Studies Pergolakan Pemikiran Antara Fundamentalisme Islam dan Fundamentalisme Neo-Liberal*. Jakarta: Erlangga, 2006.
- Choirie, Effendy; Arief Mudatsir, dan Hermawan Sulistyو (ed.). *Sejuta Gelar untuk Gus Dur*. Jakarta: Pencil 324; PB IKA-PMII, 2010.
- Daradjat, Zakiyah. *Ilmu Jiwa Agama*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Husaini, Adian dan Nuim Hidayat. *Islam Liberal: Sejarah, Konsepsi, Penyimpangan dan Jawabannya*. Jakarta: Gema Insani Prees, 2002.
- Johns, A.H. “Muslim Mystics and Historical Writing”. D.G.E. Hall (ed.), *Historians of South East Asia*. Oxford: Oxford University Press; 1961.
- Qomar, Mujamil. *NU “Liberal” Dari Tradisionalisme Ahlussunah Ke Universalisme Islam*. Bandung: Mizan, 2002.
- Siba’i, Musthafa as-. *Sari Sejarah Perjuangan Rasulullah Saw*. Jakarta: Media Dakwah, 1997.

- Sumbullah, Umi. *Islam Radikal dan Pluralisme Agama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2010.
- Syihab, Alwi. *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*. Bandung: Mizan, 1997.
- Syihab, Alwi. *Islam Sufistik: Islam Pertama dan Pengaruhnya hingga Kini di Indonesia*. Bandung: Mizan, 2001.
- Syukir, Asmuni. *Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islam*. Surabaya: Penerbit Al-Ikhlash, t.t.
- Tasmara, Toto. *Komunikasi Dakwah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.
- Thaha, Idris (ed.). *Islam Substantif: Agar Umat Tidak Menjadi Buih*. Bandung: Penerbit Mizan, 1999.
- Wahid, Abdurrahman "Islam, Anti-Kekerasan, dan Transformasi Nasional". Glenn D. Paige, Chaiwat Satha Anand, dan Sarah Gilliatt (eds.) *Islam Tanpa Kekerasan*. terj. M. Taufiq. Yogyakarta: LKiS, 1998.
- Wahid, Abdurrahman. *Islam Kosmopolitan Nilai-Nilai Indonesia Transformasi Nasional dan Kebudayaan*. Jakarta: The Wahid Institute, 2007.
- Wahid, Abdurrahman. *Islamku Islam Anda Islam Kita Agama Masyarakat Negara Demokrasi*. Jakarta: The Wahid Institute, 2010.